

Walhi Menilai Dinas LH DKI Berupaya Monopoli Informasi Polusi Udara

JAKARTA (IM) - Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi mengkritik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta soal keinginan menertibkan alat ukur polusi udara yang disediakan oleh swasta tak berizin. Walhi menilai sebagai upaya untuk memonopoli informasi soal polusi udara.

"Ada upaya dari Pemerintah DKI ini mau menguasai informasi dengan menutup corong-corong informasi milik swasta yang sebetulnya tidak perlu ditindak," kata Juru Kampanye Wahi Jakarta, M. Aminullah, kemarin.

Aminullah malah menganggap bahwa sektor swasta berperan penting dalam pemantauan polusi udara. Ketimbang menindak pemasangan alat-alatnya yang sudah lebih tersebar dibandingkan alat ukur milik penda, sehingga lebih mudah diakses data hasil pengukurannya oleh masyarakat, pemerintah justru seharus menggendang agar terlibat dalam penanganan polusi udara.

Aminullah menilai fungsi swasta, dalam konteks pemantauan polusi udara di Jakarta, sudah bagus. "Kalau

memang menurut pemerintah dan hasil temuan pemerintah mereka tidak sesuai prosedur pemasangannya, ya, tinggal dikoordinasikan bagaimana supaya bagus, supaya mereka bisa membantu, bisa terlibat."

Langkah penindakan justru dianggapnya menimbulkan kesan pemerintah ini mau menguasai informasi, "Pemerintah ini mau memonopoli informasi dengan menutup sumber-sumber informasi dari swasta," kata Aminullah.

Mendorong integrasi antara pemerintah dengan penyedia layanan pemantauan kualitas udara swasta agar dapat bekerja sama. Hal ini, baginya, lebih baik daripada menindak alat-alat yang dianggap tidak berizin.

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ingin menindak alat pengukur kualitas udara yang tidak berizin karena dianggap menyebarkan hoax. Dinas LH mengklaim bahwa data yang akurat hanya yang disediakan oleh DLH DKI Jakarta karena sudah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). • yan

Pemkab Bekasi Ajak Warga Muslim Shalat Minta Hujan

KABUPATEN BEKASI (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat (Jabar), mengajak seluruh warga Muslim di daerah itu untuk bersama-sama melaksanakan Shalat Istisqa dalam rangka ikhtiar meminta hujan.

"Kita bermunajat, memohon turun hujan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala (SWT), berdoa bersama mudah-mudahan diturunkan hujan pada musim kemarau ini," kata Kepala Bagian Kesra pada Setda Kabupaten Bekasi, Benny Yulianto Iskandar di Cikarang, Jumat (22/9).

Ia mengatakan shalat sunah meminta hujan diadwalkan pelaksanaannya di Lapangan Plasa Pemkab Bekasi pada Senin (25/9) pukul 08.30 WIB, usai apel pagi dengan melibatkan seluruh pegawai baik ASN maupun non-ASN.

Pihaknya telah mendistribusikan undangan kegiatan tersebut kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta masyarakat umum sesuai amanah kepala daerah yang dituangkan dalam Surat Undangan Bupati Bekasi Nomor RT.04/6707/Kesra/2023.

"Seperti instruksi Pak Pj Bupati Bekasi, Dani Ramadan, Shalat Istisqa ini meli-

batkan seluruh ASN dan non-ASN di lingkungan perkantoran Pemkab Bekasi. Kita juga mengundang masyarakat untuk ikut shalat sunah ini," katanya.

Sesuai arahan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi, warga Muslim juga diminta berpuasa selama tiga hari mulai hari ini hingga Minggu (24/9) atau sebelum pelaksanaan Shalat Istisqa.

"Jamaah Shalat Istisqa juga kita imbau untuk membawa peralatan perangkat shalat masing-masing," katanya.

MUI Kabupaten Bekasi sebelumnya juga telah mengeluarkan surat edaran Nomor 05/MUI/KAB-BKS/VIII/2023 berisi seruan kepada warga Muslim untuk melaksanakan Shalat Istisqa di wilayah masing-masing.

"Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta berkenaan dengan kondisi minim curah hujan di Kabupaten Bekasi, maka MUI menyampaikan seruan kepada umat Islam untuk Shalat Istisqa secara berjamaah di masjid maupun lapangan di wilayah masing-masing," kata Sekretaris MUI Kabupaten Bekasi KH Muhiddin Kamal. • yan

Pelintasan Liar di Cengkareng yang "Makan" Korban Bakal Ditutup KAI

JAKARTA (IM) - PT KAI berencana menutup pelintasan liar di petak jalan Stasiun Rawabuntu-Stasiun Duri, Cengkareng, Jakarta Barat. Hal ini dilakukan setelah peristiwa seorang pria berinisial M (32) tewas tertabrak kereta rel listrik (KRL) relasi Tangerang-Duri, pada Kamis (21/9).

"Betul (pelintasan akan ditutup), karena sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian," ujar Pelaksana Harian Manager PT KAI Daop 1 Jakarta, Feni Novida Saragih saat dihubungi, Jumat (22/9).

Hal ini, lanjut dia, juga merujuk pada Pasal 91 Ayat (1), yang berbunyi "Perpotongan antara jalur KA dan jalan dibuat tidak sebidang." Kemudian Pasal 94 Ayat (1) berbunyi "Untuk keselamatan perjalanan KA dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup," dan Pasal 94 Ayat (2) yang berbunyi "Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah."

"Idealnya pelintasan liar akan ditutup. Dengan sebelumnya terus berkoordinasi dengan Pemda, DJKA Kemenhub dan kewilaya-

han serta sosialisasi kepada warga, dan pengguna jalan," jelas Feni.

Pejalan Kaki Tewas Tertabrak KRL

Diberitakan sebelumnya, Kapolsek Cengkareng, Kompol Hasoloan Situmorang menyampaikan, korban M ditemukan tewas pada pukul 19.30 WIB. Dia menyetub, M tertabrak kereta saat berjalan kaki. "Menurut keterangan saksi, korban merupakan tukang parkir di sekitar lokasi atau TKP," ungkap Hasoloan melalui pesan singkat, Jumat (22/9).

Berdasarkan keterangan saksi berinisial SH (40), korban masih berbincang dengannya sekitar pukul 16.00 WIB. Korban kemudian pamit untuk pulang pada 17.00 WIB.

"Selanjutnya pukul 19.30 WIB saksi mendapat kabar bahwa ada orang yang tertabrak kereta api. Selanjutnya saksi menuju lokasi dan melihat korban (meninggal)," tutur Hasoloan. Sementara ini, polisi juga masih mendalami dugaan korban bunuh diri. Adapun, jenazah korban masih ditangani di RSUD Cengkareng usai insiden terjadi. "Jenazah dalam proses pengambilan (oleh keluarga)," kata dia. • yan

4 | Metropolis

FOTO/ANTARA



TARGET PERBAIKAN TROTOAR DI JIS

Sejumlah pekerja menyelesaikan perbaikan trotoar di depan Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Jumat (22/9). Dinas Bina Marga DKI Jakarta menargetkan perbaikan trotoar, meninggikan jalan hingga lampu di depan Jakarta International Stadium (JIS) akan selesai pada Oktober 2023 sebelum perhelatan Piala Dunia U-17.

SUDAH DIAJAK TINJAU SEJUMLAH RUSUN

Eks Warga Kampung Bayam Belum Tentukan Sikap

Serli, satu dari tiga warga yang diajak untuk melihat rusun. Serli menyebutkan ada beberapa rusun yang disambangi kemarin. Dua di antaranya adalah Rusun Semper Barat dan Rusun Penjaringan. Dua rusun tersebut jadi keinginan eks warga Kampung Bayam jika memang diminta sementara pindah dari depan Jakarta International Stadium (JIS). Tapi sudah penuh.

JAKARTA (IM) - Perwakilan eks warga Kampung Bayam menyatakan belum mengambil keputusan usai diajak meninjau sejumlah rumah

susun (rusun) oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara.

"Kemarin tiga orang diajak untuk lihat-lihat rusun. Salah satunya Rusun Nagrak,"

kata Serli saat dihubungi, Jumat (22/9).

Serli merupakan satu dari tiga warga yang diajak untuk melihat rusun oleh Lurah Papanggo, Jakarta Utara, Tomi Haryono. Serli menyebutkan ada beberapa rusun yang disambangi kemarin. Dua di antaranya adalah Rusun Semper Barat dan Rusun Penjaringan.

Dua rusun tersebut jadi keinginan eks warga Kampung Bayam jika memang diminta sementara pindah dari depan Jakarta International Stadium (JIS). Tapi sudah penuh. Warga juga diajak meninjau Rusun Buddha Tzu Chi, tapi opsi ini ditolak oleh karena sulitnya akses air.

Hingga kini, Serli dan warga lainnya belum memutuskan perihal tawaran pindah ke rusun-rusun yang kemarin ditinjau.

"Tadi pagi aku ditelepon kelurahan, gimana (soal rusun kemarin), tapi kami masih cari solusi," katanya.

Sebelumnya, Lurah Papanggo, Tomi Haryono mengimbau warga Kampung Bayam mengosongkan tenda-tenda mereka yang didirikan di dekat JIS maksimal hari ini, Jumat (22/9). Hingga sekarang, tenda masih berdiri dan beberapa warga masih di sana.

"Kemarin sama Pak Lurah cuma diajak lihat rusun, enggak ada imbauan lagi (soal pengosongan tenda)," ucap Serli.

Eks warga Kampung

Bayam memilih tinggal di tenda-tenda yang dipasang di depan JIS sebagai bentuk protes terhadap Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Warga yang huniannya digusur demi pembangunan JIS ini belum bisa menempati Kampung Susun Bayam karena belum sepatutnya soal harga sewa. Sementara itu, Tomi menuturkan Pemprov DKI Jakarta hingga kini masih memberikan keringanan sewa bagi warga rusun yang berlaku sejak pandemi Covid-19. Sebabnya bagi eks warga Kampung Bayam yang mau pindah ke Rusun Nagrak atau Rusun Muara Angke belum dikenal retribusi. "Kami mengimbau mereka agar segera bisa pindah," ucap dia. • yan

Semua Bangunan di Kota Depok Harus Ada IMB

DEPOK (IM) - Segala bentuk jenis bangunan yang berdiri di Kota Depok harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal itu diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan, Pengaduan dan Regulasi (WASDU) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, Suryana Yusuf, Jumat (22/9).

"Tugas pokok dan fungsi kami yakni mengenai pengawasan perizinan, khususnya tentang IMB yang ada di Kota Depok, baik yang belum berizin, yang sedang dalam pelaksanaan, maupun yang sudah mendapatkan perizinannya. Intinya, semua bangunan yang berdiri harus memiliki IMB," jelas Suryana.

Saat ditanyakan, apakah harus memiliki IMB terlebih dahulu baru kemudian mendirikan bangunan atau sebaliknya? "Harus mempunyai IMB terlebih dahulu," ucap Suryana.

Ia menjelaskan, jika ada yang belum berizin, pihaknya akan menegur. "Kami tegur, ini mau bikin apa, jangan dulu membangun kalau belum memiliki IMB," terang Suryana.

Lanjut Suryana, untuk yang sedang membangun, sudah dikeluarkan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), Surat

Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan Site Plan.

"Harus sudah ada izin yang sudah diberikan, kami cek lagi sesuai atau tidak dengan yang ada di lapangan. Dan, jika pembangunan mereka sudah selesai, kita cek lagi apakah mereka menambah atau mengurangi bangunan tersebut," jelasnya.

Sesuai dengan Perda lama nomor 13 tahun 2013 pasal 113 dijelaskan bahwa sebelum membangun harus sudah ada IMB terlebih dahulu.

"Di Kota Depok terdapat 11 pengawas yang tersebar di seluruh kecamatan. Mereka bekerja secara mobile untuk mengawasi dan membuat laporan kepada WASDU DPMPTSP setiap harinya. Dan, jika pengawas menemukan pelanggaran di lapangan, maka pelanggar akan dikenakan sanksi," tegas Suryana.

Terkait sanksi yang akan diberikan, ia menjelaskan bahwa sesuai peraturan yang berlaku, pihak pelanggar bisa dikenakan sanksi denda akibat kelalaiannya berupa Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 dan yang terakhir akan ada penyegelan oleh tim pengakakan perda, penindakannya ada di ranah Satpol PP.

"Untuk bangunan gedung yang telah berdiri maka ter-

lebih dahulu pemilik Gedung harus mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF)," ungkap Suryana.

SLF adalah proses setelah IMB keluar. Pihaknya sedang mendata bangunan bangunan yang belum memiliki SLF. Pada peraturan PP nomor 16 tahun 2021 bangunan sejenis toko seperti minimarket adalah wajib punya SLF. "Karena SLF merupakan kebijakan baru, maka kami masih mensosialisasikannya kepada para pelaku usaha untuk membuat SLF," terang Suryana.

Menyinggung tentang Kapel GBI Cinere, Suryana menjelaskan, bangunan rumah ibadah tetap dikembalikan ke fungsi awal, yang artinya, tidak ada toleransi semua suku, ras dan agama.

"Semua sama, harus tetap memenuhi peraturan yang ada. Harus ada izin. Kalau bangunan tersebut diperuntukkan untuk ruko atau untuk jasa perdagangan maka dipergunakan untuk jasa perdagangan. Kalau ruko dipakai untuk rumah ibadah mereka harus merubah izinnya disertai dengan rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kami berkoordinasi dengan Lurah dan Camat untuk mengurusnya," jelasnya. • pra



AKSI GREENPEACE INDONESIA SIKAPI POLUSI UDARA DI JAKARTA

Sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan tulisan "Clean Air Now" yang dikumpulkan dari debu polusi saat menggelar aksi di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (22/9). Aksi ini bertujuan untuk mengingatkan kepada masyarakat dan juga pemerintah bahwa kualitas udara di Jakarta masih tercemar, serta menuntut pemerintah untuk lebih serius menangani polusi udara.

CUKUP BAWA STNK

Pemprov DKI Sediakan Fasilitas Uji Emisi Gartis di 7 Terminal Bus

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan fasilitas uji emisi kendaraan di tujuh terminal bus. Pengendara bisa mendapatkan pelayanan uji emisi gratis dengan hanya membawa kendaraan beserta STNK. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan, penyediaan fasilitas uji emisi tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

"Untuk uji emisi hanya perlu datang ke lokasi dengan membawa STNK dan kendaraan," ujar Syafrin dalam keterangannya, Jumat (22/9).

Uji emisi kendaraan gratis itu tersedia di Terminal Bus Tanjung Priok, Terminal Bus Ragunan, Terminal Bus Pulogebang dan Terminal Bus Kampung Rambutan. Selain itu, fasilitas juga tersedia di Terminal Bus Kalideres, Terminal Mobil Barang Rawa Buaya dan Terminal Bus Grogol.

Adapun pelaksanaan uji emisi gratis di terminal wilayah Jakarta ini menurut rencana berlangsung sampai 30 September 2023.

"Jadwalkannya Senin sampai Jumat pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Khusus untuk Terminal Pulogebang, tersedia pukul 13.00 - 16 WIB," kata Syafrin.

Sebagai informasi, Provinsi DKI Jakarta juga telah mengambil beberapa langkah

untuk mengatasi masalah polusi udara, antara lain penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan melakukan razia uji emisi kendaraan bermotor.

Selain itu, upaya lain yang dilakukan yakni penyiraman jalan dengan water cannon dan menyemprotkan air dari atap gedung tinggi di Ibu Kota. Langkah ini diharapkan dapat menekan polusi udara di Jakarta yang saat ini masih belum membaik. Sebagai informasi, kualitas udara DKI Jakarta pada Jumat (22/9) pagi masuk kategori tidak sehat.

Dikutip dari laman pengukuran kualitas udara IQAir, indeks kualitas udara di DKI Jakarta per pukul 07.00 WIB tercatat di angka 153. Jakarta berada di peringkat ketiga dalam urutan kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

Adapun untuk konsentrasi polutan tertinggi dalam udara DKI Jakarta pagi hari ini yakni PM 2.5, dengan nilai konsentrasi 60 mikrogram per meter kubik. • yan

PENGUMUMAN RENCANA PEMBAGIAN KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI PT. HOERBIGER KOMPRESOTAMA INDONESIA (Dalam Likuidasi)

Guna memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 butir b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka dengan ini diumumkan bahwasanya masih terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi PT. HOERBIGER KOMPRESOTAMA INDONESIA (Dalam Likuidasi) sesuai dengan Neraca likuidasi akhir per tanggal 31 Agustus 2023 yang akan dibagikan secara proposional kepada Seluruh Pemegang Saham Perseroan (dalam likuidasi)

Jakarta, 23 September 2023
Likuidator
PT HOERBIGER KOMPRESOTAMA INDONESIA (Dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan akta No. 88, tanggal 21 September 2023, dibuat dihadapan YUNITA ARISTINA, SH., MKN, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, akta Pembubaran perseroan terbatas PT. NACKAVELLI KREASI VISUAL, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, memutuskan:

- Membubarkan Perseroan Terbatas PT. NACKAVELLI KREASI VISUAL
- Menunjuk Ir. WIBUNADI TANUSAPUTRA sebagai Likuidator

Apabila terdapat kreditur atau pihak yang keberatan, dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal pengumuman ini ditunjukkan ke alamat:

Cyber 2 Tower Lt. 17, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Demikian pengumuman ini disampaikan.
Jakarta, 23 September 2023
Likuidator